

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

Muhammad Anas

Universitas Ichsan Gorontalo

E-mail: annasnanang@1974gmail.com

Abstract. *In managing village finances, reliable human resources, accountability and transparency are needed because considering that the funds disbursed by the central government are very large in amount for each village, reaching hundreds of millions of rupiah and if they are not managed well, there are concerns about the development that was originally planned and deliberation at the village level will fail miserably. This research was conducted using the saturated sample method, resulting in 59 respondents who knew village financial management. This research uses multiple linear regression analysis methods. Where the results of the research show that Human Resources (X1) partially have a significant influence on village financial management (Y) with a tcount value of 2.12 > ttable of 2.00 with a significance value of 0.03 < 0.05, accountability (X2) partially has a significant influence on village financial management (Y) tcount value of 2.16 > ttable of 2.00 with a significance value of 0.02 < 0.05. transparency (X3) partially has a significant influence on village financial management (Y) tcount value of 2.34 > ttable of 2.00 with a significance value of 0.02 < 0.05 and simultaneously the human resources variable (X1), accountability (X2) and transparency (X3) have a significant influence on village financial management (Y) amounting to 20.78 > 5.68 with a significance value of 0.04 < 0.05.*

Keywords: Human Resources, Accountability, Transparency

Abstrak. Dalam mengelola keuangan desa, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, akuntabilitas dan transparansi karena mengingat dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sangat besar jumlahnya untuk setiap desa yaitu mencapai ratusan juta rupiah dan apabila tidak dikelola dengan baik, maka dikhawatirkan pembangunan yang semula sudah direncanakan dan dimusyawarahkan di tingkat desa akan gagal total. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sampel jenuh, sehingga diperoleh sebanyak 59 responden yang mengetahui pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (X₁) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,12 > t_{tabel} sebesar 2,00 dengan nilai signifikansi sebesar 0,03 < 0,05, akuntabilitas (X₂) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) nilai t_{hitung} sebesar 2,16 > t_{tabel} sebesar 2,00 dengan nilai signifikansi sebesar 0,02 < 0,05. transparansi (X₃) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) nilai t_{hitung} sebesar 2,34 > t_{tabel} sebesar 2,00 dengan nilai signifikansi sebesar 0,02 < 0,05 dan secara simultan variabel sumber daya manusia (X₁), akuntabilitas (X₂) dan transparansi (X₃) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 20,78 > 5,68 dengan nilai signifikansi sebesar 0,04 < 0,05.

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Transparansi

PENDAHULUAN

Keuangan desa yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dikelola oleh pemerintah desa yang bertugas sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan desa. Di samping itu, cakupan dana yang pemerintah desa kelola di antaranya Dana Transfer Pemerintah (pusat), Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sumber pendapatan desa bisa mengalami peningkatan dengan disediakannya dana desa, hal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa. Namun, keuangan desa tersebut juga akan menimbulkan problem perihal pengelolaannya.

Berdasarkan regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini pelaksanaan penggunaan dana desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 190/PMK.07/2021 tentang pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam BAB VII pasal 32 pada ayat (1) bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa, kegiatan dalam bidang ketahanan pangan dan hewani, dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di Desa, ayat (2) dinyatakan bahwa besaran dana desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN anggaran tahun 2020., maka dalam pengelolaan keuangan desa harus betul-betul membuat masyarakat desa menjadi sejahtera. Mengingat desa mendapatkan alokasi dana yang cukup besar sementara pengelolaannya dilaksanakan secara mandiri, Kompetensi seorang kepala desa sangat dibutuhkan dalam hal pengelolaan keuangan Desa karena dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat sangat besar jumlahnya untuk setiap desa yaitu mencapai ratusan juta rupiah dan apabila tidak dikelola dengan baik, maka dikhawatirkan pembangunan yang semula sudah direncanakan dan dimusyawarahkan di tingkat desa akan gagal total karena tidak menutup kemungkinan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa masih minim termasuk ketidakmampuan pemerintah desa serta aparat desa dalam mengelola anggaran dana desa sehingga tidak maksimalnya apa yang sudah direncanakan,

Selain sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa, juga diperlukan adanya akuntabilitas yang merupakan kewajiban bagi pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan serta mengungkapkan setiap kegiatan yang dilaksanakan baik pemerintah maupun masyarakat. Akuntabilitas yang baik tentu akan

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik pula dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga pengelolaan dana desa tersebut akan memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat Menurut Sukasmanto dalam Sumpeno (2019) akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemeritahan desa. akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memberikan kesempatan mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya laporan keuangan saja akan tetapi wajib menginformasikan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik, Wahyu dalam Astuti dan Farida (2013).

Faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa adalah adanya transparansi, yaitu asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Dalam pengertian ini, pemerintah harus mampu memberikan informasi yang tepat kepada siapa saja yang membutuhkan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa dan masyarakat desa berhak diberitahu perihal tanggungjawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan yang diamanatkan terhadapnya dengan jujur dan terbuka. Oleh karena itu, indikator transparansi menurut Mardiasmo (2009) yaitu informatif (*informativeness*), keterbukaan (*openness*) dan pengungkapan (*Disclouser*).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang, "Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato".

Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data-data dan informasi tentang faktor-faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sangsekerta deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut R. Bintarto dalam Fairus Adira (2020) desa adalah entitas atau kesatuan geografi, kemasyarakatan, perniagaan, politik serta kebuayaan yang terpendam di suatu area dalam relasi dan efeknya secara berbalasan dengan wilayah lain. Widjaja (2009) memberikan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asliberdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang pengertian desa yaitu suatu wilayah yang mempunyai batas-batas wilayah dan mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang ada dalam wilayah desa. Sedangkan pengertian desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur tentang kepentingan warga setempat yang diakui dan dihormati pada system pemerintahan NKRI. Menurut Nurcholis (2011) desa adalah suatu tempat yang diberi legalitas berupa hak otonom yang berbadan hukum disebut sebagai pemerintahan dan diberikan kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus segala kegiatan penduduk setempat sesuai dengan batas wilayah yang telah ditentukan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa apabila mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, agar tidak terjadi kecurangan dan agar bantuan betul-betul disalurkan sesuai dengan masyarakat penerima manfaat atau tidak salah sasaran lagi sebagai alasan klasik yang sering terjadi yaitu adanya kekeliruan data.

Berikut rincian indikator pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan yang tepat sesuai dengan kewenangannya, perencanaan pembangunan mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota, dan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dalam bentuk APBDes berdasarkan RPJMDes dan RKDes tahun berkenaan dan disusun oleh Sekertaris Desa kemudian disampaikan kepada Kepala Desa dan setelah itu dibahas bersama dengan BPD dengan melibatkan masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya, maka semua transaksi yang timbul dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang sesuai dan sah. Kepala desa adalah orang yang memiliki kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dikuasakan kepada perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Kemudian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan permintaan pembayaran.

c. Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa berupa penerimaan dan pengeluaran dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh kepala desa yang dimulai sebelum masuknya tahun anggaran bersangkutan dan sesuai dengan keputusan kepala desa, bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar serta mempertanggung jawabkan semua keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, dan bendahara wajib mempertanggungjawabkan dana desa melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulannya kepada kepala desa dan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Pelaporan atas kegiatan yang dibiayai oleh APBDes dimana laporan tersebut disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati secara berkala artinya laporan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dibuat setiap enam bulan untuk laporan semester awal selambat-lambatnya akhir bulan enam tahun berjalan dan semester akhir tahun selambat-lambatnya akhir bulan satu tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terhadap realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pendanaan dengan mencantumkan format laporan pertanggung jawaban realisasi Pelaksanaan APBDes, format laporan pemerintah daerah yang masuk ke desa harus disampaikan ke masyarakat baik melalui media informasi maupun dengan secara tertulis.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya karena dapat dijadikan sebagai acuan atau kerangka dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Faktor-faktor tersebut dihimpun dari berbagai sumber untuk dijadikan sebuah variabel yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain:

a. Sumber Daya Manusia

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dikembangkan oleh Delano dan Deviani (2013) dimana sumber daya manusia dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kepala desa dan aparatur desa dalam mengelola dana desa yang indikatornya terdiri dari tanggungjawab, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki. Sehingga dengan demikian akan tumbuh komitmen yang kuat terhadap organisasi. Dengan adanya komitmen yang tinggi terhadap suatu organisasi akan menjadikan kepala desa dan aparatur desa lebih bertanggungjawab pada tugas dan menampilkan kinerja yang lebih baik dalam mengelola dana desa.

Peningkatan kemampuan aparat desa sebagai sumber daya yang mengelola dana desa di tingkat pemerintahan desa sangat menunjang keberhasilan program desa, namun peroblem kadang didapati di pemerintah desa menurut Sidik dalam Saudi, dkk (2020) yakni adanya aparat desa yang kurang memahami tata cara mengelola masalah kewenangan pemerintahan desa, hubungan komunikasi antar aparat desa dan penyelenggara yang tidak dilaksanakan secara kontinyu sehingga kurang optimal, kurangnya pemahaman aparat desa tentang pemberdayaan sebagai sebuah strategi dalam pembangunan desa mengakibatkan kurang variatifnya pemberdayaan sehingga kegiatan desa masih minim. Sedangkan menurut Arsjad (2018) penyebab kinerja aparat desa tidak maksimal karena pendistribusian peran kerja serta tugas aparat desa belum efektif, kurangnya disiplin kerja, rendahnya pendidikan, minimnya pelatihan yang diikuti aparat desa, kurangnya pelatihan diadakan di desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa untuk menunjang keberhasilan desa.

Menurut Hevesi (2005) bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah ciri khas yang dimiliki oleh individu dalam hal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk melakukan suatu aktivitas. Sejalan dengan hal tersebut Mathis (2002) menyatakan bahwa nilai sumbe daya manusia akan dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu rutinitas agar maksimal dengan tidak memandang *background* dalam pengembangan kemampuan individu tersebut.

Wasistiono dan Tahir (2006) mengemukakan bahwa pada dasarnya aparat pemerintah desa memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- 1, Rendahnya kualitas aparatur desa
2. kebijakan tentang aturan organisasi pemerintah desa belum sempurna
3. Kemampuan perencanaan di tingkat desa masih rendah
4. Belum sinkronnya antar implementasi kebijakan sebagai *output* dan *input* dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dari pernyataan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki, tanggung jawab yang tinggi dan pelatihan yang cukup serta pengalaman yang tinggi.

b. Akuntabilitas

Pencapaian hasil dari pengelolaan keuangan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan dengan ketetapan pencapaian tujuan wajib dipertanggungjawabkan oleh pemerintahan desa di depan seluruh pihak termasuk dihadapan masyarakat desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemeritahan desa. Sedangkan menurut Wahyu dalam Astuti dan Farida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memberikan kesempatan mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya laporan keuangan saja akan tetapi wajib menginformasikan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik, (Sukasanto dalam Sumpeno (2019). Menurut Yesinia et.al (2018) bahwa akuntabilitas merupakan sebuah bentuk kewajiban dari seseorang maupun organisasi atau lembaga dalam rangka untuk mempertanggung jawabkan sebuah kesuksesan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan suatu misi baik perorangan maupun organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah diputuskan sebelumnya berdasarkan tanggungjawab yang menjadi sebuah kesepakatan untuk dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas memerlukan pelaporan, fokus dari alat-alat akuntabilitas adalah pada pelaporan kinerja, baik perhatian maupun hasilnya. Malik Imron, (2005), adapun parameter akuntabilitas mencakup:

a. Rencana Strategik

Rencana Strategik adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari rencana stratejik antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi, menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan operasional, menentukan ukuran untuk mengawasi hasil, dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.

b. Rencana kerja

Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.

c. Kesepakatan kinerja

Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.

d. Laporan akuntabilitas

Dipublikasikan tahunan, laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan, seperti laporan keuangan yang telah diaudit.

e. Penilaian Sndiri

Organisasi mengawasi kinerjanya dan menilai kesanggupannya dalam pencapaian tujuan kinerja melalui tahapan-tahapan serta mampu mengendalikannya.

f. Penilaian Kinerja

Penilaian ini memperbandingkan kinerjanya yang riil selama periode review tertentu dengan kinerja yang telah direcanakannya, terdapat adanya hal-hal yang perlu menjadi perhatian dari hasil perbandingan tadi, misalnya perlu adanya perubahan atas dari kinerja yang telah dilakukan dalam rangka mengarah pada masa yang direncanakan.

g. Pengendalian Manajemen

Diharapkan pada para menejer memiliki tanggungjawab terhadap kualitas dan kesesuaian jam kerja dalam menaikkan produktivitas, pengendalian biaya-biaya dan menekan berbagai aktivitas yang bersifat negatif.

c. Transparan

Adanya prinsip keterbukaan dari pihak pemerintahan desa selaku yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan keuangan desa dalam hal membuka diri, jujur dan tidak diskriminatif sehingga masyarakat memperoleh informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya sebagaimana hak masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan keuangan desa.

Transparansi mempunyai makna terbukanya sebuah organisasi untuk menyalurkan suatu informasi yang berhubungan dengan kegiatan manajemen sumberdaya manusia terhadap pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Pengertian lain transparansi adalah penjabaran pengelolaan organisasi pihak publik sehubungan dengan kegiatan, program dan kebijakan yang telah, sementara, dan yang mau dilaksanakan serta sumberdaya yang digunakannya, (Mahmudi 2016). Sedangkan Ritonga dan Syahrir (2016) menyatakan bahwa transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat, akan tetapi juga dapat dipublikasikan dengan tepat waktu, informasi yang disajikan tepat waktu tentunya akan lebih berguna dan mempunyai pengaruh dalam pengambilan sebuah keputusan public terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan adanya prinsip transparansi, maka ada dua hal yang diinginkan dapat tercapai, yakni adanya komunikasi public dari pemerintah dan hak public dalam memperoleh informasi. Transparansi juga dapat diseimbangkan dengan kebutuhan dan kerahasiaan lembaga yang berimbas pada kerahasiaan individu.. Transparansi juga harus diimbangi dengan kebutuhan dan kerahasiaan institusi dan informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Adanya akses terhadap informasi akan menimbulkan partisipasi dari masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Bappenas mengemukakan definisi partisipasi sebagai prinsip menjamin atau menuntut masyarakat harus diberdayakan, diberikan kesempatan dan diikutsertakan untuk berperan dalam proses-proses birokrasi, mulai dan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Indikator Transparansi

Transparansi adalah asas yang memberikan jaminan kemerdekaan setiap manusia dalam mendapatkan sebuah akses informasi sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan pemerintahan dalam hal ini pembuatan kebijakan dan penyelenggaraannya serta output dapat dihasilkan secara cepat dan tepat segalanya, sebagaimana menurut Mardiasmo (2009) sebagai berikut:

- a) Informasi merupakan suatu cara untuk menyampaikan data, kejadian atau peristiwa, berita, tatacara atau prosedur dan penjabaran sehubungan dengan prosedur terhadap orang-orang yang menginginkan informasi yang lebih terang dan tepat terkait dengan acara tersebut.
- b) Keterbukaan merupakan pengungkapan informasi yang merupakan hak setiap orang-orang yang memiliki kepentingan dalam mendapatkan informasi.
- c) Pengungkapan terbagi atas dua bagian yaitu pengungkapan yang bersifat wajib, yaitu segala sesuatu yang merupakan kewajiban yang didasari atas prosedur dan peraturan operasi standar pengawasan, dan pengungkapan yang sifatnya sukarela baik yang di luar telah dipersyaratkan, standar akuntansi serta aturan regulasi.
yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib, adalah semua yang telah menjadi kewajiban berdasarkan prosedur dan peraturan operasi standar pengawas. Sedangkan pengungkapan sukarela dilakukan secara sukarela di luar apa yang dipersyaratkan oleh perusahaan, standar akuntansi, dan peraturan regulator.

Berdasarkan pemaparan tersebut, disimpulkan bahwa dengan adanya transparansi yang diterapkan, maka informasi yang berhubungan dengan data keuangan dapat diketahui oleh masyarakat dengan sangat mudah dan jelas, oleh sebab itu dengan adanya prinsip keterbukaan dari pihak pemerintahan desa selaku yang bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan keuangan desa dalam hal membuka diri, jujur dan tidak diskriminatif sehingga masyarakat memperoleh informasi seluas-luasnya dan sebenar-benarnya sebagaimana hak masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan keuangan desa.

Metode Penelitian

Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan isu atau masalah yang akan diteliti melalui riset. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal ini sumber daya manusia, akuntabilitas dan transparansi serta pengelolaan keuangan desa.

Desain penelitian

Penelitian ini didesain dalam bentuk deskriptif kuantitatif yang dikualitatifkan yang dapat memberikan gambaran dengan menganalisis data dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dari kuisioner yang disebarkan kepada responden untuk dijawab atau ditanggapi kemudian ditabulasi.

Definisi Operasional Penelitian

Variabel penelitian perlu dioperasionalkan dengan maksud untuk memberi batasan-batasan pengertian dari indikator masing-masing variabel penelitian yang akan diteliti sehingga tidak terjadi multitafsir tentang definisi dari variabel sumber daya manusia, akuntabilitas dan transparansi serta pengelolaan keuangan desa. Adapun definisi beserta indikator dari variabel dalam penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel X

Variabel	Indikator	Skala
Sumber Daya Manusia (X ₁)	a. Pengetahuan b. Kemampuan c. Keterampilan	Ordinal
Akuntabilitas (X ₂)	a. Rencana Strategi b. Rencana kerja c. Kesepakatan kinerja d. Lapran akuntabilitas e. Penilaian Sendiri f. Penilaian Kinerja	
Transparansi (X ₃)	a. Informatif b. Keterbukaan c. Pengungkapan	

Sumber: Hevesi (2005), Malik Imron, (2005), Mardiasmo (2009)

Tabel 2
Definisi Operasional Variabel Y

Variabel	Indikator	Skala
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertaanggung jawaban	Ordinal

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel jenuh karena jumlah populasinya kecil. Sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi akan dijadikan sebagai sampel. Menurut Sugiyono (2015) sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila

seluruh anggota populasi relatif kecil atau untuk menghindari kesalahan yang besar. Senada dengan yang dinyatakan oleh Arikunto (2013) bahwa sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti. Dengan demikian maka dalam penelitian ini penulis melibatkan responden sebanyak 59 orang yang mengetahui pengelolaan keuangan desa dan responden yang mengetahui pengelolaan keuangan desa.

Metode Analisis

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi linear berganda karena menggunakan tiga variabel independen yaitu sumber daya manusia (X_1), akuntabilitas (X_2) dan transparansi (X_3) sedangkan variabel dependennya (Y) adalah pengelolaan keuangan desa. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

A	=	Nilai tetap
β_1, β_2 dan β_3	=	Koefisien korelasi
X_1	=	Sumber Daya Manusia
X_2	=	Akuntabilitas
X_3	=	Transparansi
Y	=	Pengelolaan Keuangan Desa
ε	=	Standar Error

Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yakni :

Pengujian Hipotesis secara Parsial

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} , berdasarkan hal tersebut, maka dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} , maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif.
2. Jika nilai $t_{hitung} <$ nilai t_{tabel} , maka H_0 diterima dan menolak hipotesis alternatif.

Uji t ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan *probability value* (tingkat signifikansi) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan *probability value* hasil penelitian.

Dengan tingkat signifikansi (*probability value*) yang ditetapkan sebesar 0,05, maka kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika *probability value* hasil penelitian $<$ *probability value* peneliti (0,05), maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif.
2. Jika *probability value* hasil penelitian $>$ *probability value* peneliti (0,05) , maka H_0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak.

Pengujian Hipotesis secara Simultan

Pengujian pengaruh variabel independen secara simultan terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan nilai semua variabel independen (Algifari,2000). Uji F atau ANOVA dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} , berdasarkan hal tersebut, maka dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai $F_{hitung} >$ nilai F_{tabel} , maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif.
2. Jika nilai $F_{hitung} <$ nilai F_{tabel} , maka H_0 diterima dan menolak hipotesis alternatif.

Uji F ini juga dapat dilakukan dengan membandingkan *probability value* (tingkat signifikansi) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan *probability value* hasil penelitian. Dengan tingkat signifikansi (*probability value*) yang ditetapkan sebesar 0,05, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Apabila *probability value* hasil penelitian $<$ *Probability value* peneliti (0,05), maka H_0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif
2. Apabila *probability value* hasil penelitian $>$ *probability value* peneliti (0,05), maka H_0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak

Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda (*multiple regression method*) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang terdiri dari sumber daya manusia (X_1), akuntabilitas (X_2) dan transparansi (X_3) terhadap variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan desa (Y). Hasil perhitungan regresi berganda dengan menggunakan program SPSS. Secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Ringkasan Hasil Analisis Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	3.545	.392	
	Sumber Daya Manusia	.187	.088	.286
		.170	.060	.154
	Transparansi	.117	.050	.325

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: data primer, diolah 2023

Berdasarkan ringkasan hasil regresi seperti yang terlihat pada tabel 3 di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,545 + 0,187X_1 + 0,170X_2 + 0,117X_3$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi sumber daya manusia (X_1) sebesar 0,187. Ini berarti bahwa perubahan variabel sumber daya manusia (X_1) akan diikuti oleh perubahan pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 0,187 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien regresi akuntabilitas (X_2) sebesar 0,170 menunjukkan bahwa perubahan variabel akuntabilitas (X_2) akan diikuti oleh perubahan pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 0,170 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien regresi transparansi (X_3) sebesar 0,117 berarti bahwa perubahan variabel transparansi (X_3) akan diikuti oleh perubahan pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 0,117 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Persamaan regresi di atas juga menunjukkan nilai konstanta sebesar 3,545 yang berarti bahwa nilai pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 3,545 jika variabel lainnya bernilai 0.

Selanjutnya nilai *goodness of fit model* yaitu variasi naik turunnya variabel pengelolaan keuangan desa (Y) dapat dilihat melalui nilai koefisien determinasi (R^2) dengan model summary pada Tabel 4.

Tabel 4
Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.567 ^a	.321	.084	.15123

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Hasil olahan data, 2023

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada tabel di atas menunjukkan angka 0,321 atau 32,1%, artinya bahwa 32,1% variasi naik turunnya variabel pengelolaan keuangan desa (Y) mampu dijelaskan oleh variabel sumber daya manusia (X_1), akuntabilitas (X_2) dan transparansi (X_3). Sedangkan sisanya sebesar $100 - 32,1 = 67,9\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis pertama (H_1), hipotesis kedua (H_2), dan hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini, yakni untuk melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri sumber daya manusia (X_1), akuntabilitas (X_2) dan transparansi (X_3) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y).

Uji-t dilakukan untuk membandingkan nilai t_{tabel} dan nilai t_{hitung} pada taraf signifikansi 0,05. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka hipotesis penelitian diterima. Sebaliknya jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} < t_{tabel}$), maka hipotesis penelitian ditolak. Adapun nilai t_{tabel} untuk $\alpha = 5\%$, dan nilai df sebesar $n - k - 1 = 59 - 3 - 1 = 55$, maka nilai df adalah 55, sedangkan nilai t-tabel diperoleh sebesar 2,000.

Uji signifikansi juga dapat dilihat dari nilai signifikansi koefisien regresi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian dapat diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak. Hasil regresi berganda dari uji parsial atau Uji-t dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji-t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	9.037	.000
	Sumber Daya Manusia	2.12	.039
	Akuntabilitas	2.16	.028
	Transparansi	2.34	.023

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Hasil olahan data, 2023

Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Pengaruh sumber daya manusia (X_1) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) dispesifikasikan dalam hipotesis pertama (H_1) yaitu:

H_1 : Sumber daya manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y)

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 2,12. Nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,00, yang berarti bahwa sumber daya manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y). hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,03. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan sumber daya manusia (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y), diterima.

a. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Pengaruh akuntabilitas (X_2) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) dispesifikasikan dalam hipotesis kedua (H_2) yaitu:

H_2 : Akuntabilitas (X_2) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y).

Berdasarkan perhitungan analisis regresi diperoleh t_{hitung} sebesar 2,16. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,00, yang berarti bahwa secara signifikan akuntabilitas (X_2) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa (Y). Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,02. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan akuntabilitas (X_2) berpengaruh signifikan pengelolaan keuangan desa (Y), diterima.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Pengaruh transparansi (X₃) terhadap pengelolaan keuangan desa dalam hipotesis ketiga (H₃) yaitu:

H₃: Transparansi (X₃) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y).

Berdasarkan perhitungan analisis regresi diperoleh t_{hitung} sebesar 2,34. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} , sebesar 2,00 yang berarti bahwa transparansi (X₃) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y). Hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar 0,02, karena lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa transparansi (X₃) berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y), diterima.

Uji Simultan (Uji-F)

Uji-F atau ANOVA digunakan untuk membandingkan tingkat signifikansi dengan (*probability value*) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan *probability value* hasil penelitian. Hasil regresi berganda dari uji simultan atau Uji-F dapat dilihat pada Tabel 6. berikut:

Tabel 6
Hasil regresi Uji-F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.191	3	.064	20.782	.049 ^a
	Residual	1.258	55	.023		
	Total	1.449	58			

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas, Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber: Hasil olahan data, 2023

Pengujian terhadap hipotesis keempat yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan menggunakan uji F.

H₄: Sumber Daya Manusia (X₁), Akuntabilitas (X₂) dan Transparansi (X₃) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y).

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda pada tabel di atas, nampak bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} ($20,782 > 5,689$) dengan probabilitas terjadinya kesalahan F_{hitung} lebih kecil dari taraf kesalahan (α) yang ditetapkan yaitu $0,04 < 0,05$.

Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel independen yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (X_1), akuntabilitas (X_2) dan Transparansi (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa (Y).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (X_1) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) dengan nilai t_{hitung} sebesar 2,12 > t_{tabel} sebesar 2,00 dengan nilai signifikansi sebesar 0,03 < 0,05.
2. Akuntabilitas (X_2) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) nilai t_{hitung} sebesar 2,16 > t_{tabel} sebesar 2,000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,02 < 0,05
3. Transparansi (X_3) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) nilai t_{hitung} sebesar 2,343 > t_{tabel} sebesar 2,000 dengan nilai signifikansi sebesar 0,02 < 0,05
4. Secara simultan variabel Sumber Daya Manusia (X_1), Akuntabilitas(X_2) dan Transparansi (X_3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 20,782 > 5,689 dengan nilai signifikansi sebesar 0,04 < 0,05.

Saran

Berdasarkan simpulan dalam penelitian ini, maka saran untuk pihak yang terkait adalah sebagai berikut;

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah desa untuk memaksimalkan peranannya dalam pengelolaan keuangan desa demi kemajuan pembangunan desa.
2. Disarankan kepada pihak pemerintah desa aparatur desa untuk betul-betul menggunakan keuangan desa sesuai dengan peruntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2000, *Analisis, Teori Regresi: Teori Kasus dan Solusi*, Yogyakarta, BPFE
- Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Edisi Revisi, Rineka Cipta.
- Arsjad, M.F, 2018, *Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo*. Gorontalo Journal of Public Administration Studies.
- Astuti dan Farida Herma, 2013, *Pengembangan Panduan Pelatihan Moral Awareness Untuk SMP*.
- Delano G.F dan Deviani, 2013, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal WRA, 1,21-45.
- Fairus Adira, 2020, *Mengenal Desa dan Pemerintahan Desa*, Jogjakarta. Fixelindo.
- Hevesi G. Alam, 2005, *Standards for Internal Control in New State Government*. Diakses dari [www. Osc.state.ny.us](http://www.Osc.state.ny.us).
- Malik Imron, 2005, *Prosedur Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)* Jakarta, PT Radjagrafindo Persada.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi.
- Mathis Robet L,2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Salemba.
- Nurcholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 20 tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Sumpeno Wahyudin, 2019, *Perencanaan Desa Terpadu, Reinforcement, Action, and Development*, Banda Aceh, Edisi Kedua.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Wasistiono Sadu dan M. Irawan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa, Bandung, CV. Fokus Media*.
- Widjaja Azwar, 2009, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, Jakarta, Penerbit PT Rineka Cipta.
- Yesinia et.al, 2018, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang)*. Jurnal Akuntansi Riset. 10 : (1) : 105-112.